

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan, rentan dan sering terkena masalah sosial. Masalah sosial ini adalah puncak dari banyak masalah yang lebih kecil. Faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, pengalaman kerja, iklim sosial dan politik, dukungan keluarga, kesehatan fisik dan mental, dan sebagainya semuanya berperan. Kemiskinan merupakan masalah serius, terutama bagi negara-negara yang masih berkembang secara ekonomi. Bukan rahasia lagi bahwa kemiskinan adalah masalah utama dalam masyarakat Indonesia.¹

Istilah "masalah sosial" digunakan untuk menggambarkan keadaan yang oleh banyak anggota masyarakat umum dipandang sebagai hal yang meresahkan, tidak diinginkan, berpotensi berbahaya, dan merugikan sebagian besar penduduk.² Sangat penting bahwa pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian dan lokal bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang mengancam untuk menggagalkan upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Masalah bagaimana menghadapi tunawisma adalah salah satu hambatan untuk maju saat ini.³ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani,

¹ Leksono, Ruben Betarushi (2014) Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Rumah Singgah Anak Jalanan Di Yogyakarta. S1 thesis, UAJY.

² Kartini, Kartono. (2005). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers., Hal 6

³ Soedjono (1989). Gelandangan di Kancuh Reformasi. LP3ES, Hal 15

maupun sosial secara memadai.⁴ Artinya PMKS merupakan kelompok masyarakat yang rentan sosial dengan kondisi yang belum sejahtera, seperti kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan belum terpenuhi.⁵

Berdasarkan informasi dari laman sindonews.com, ada sekitar 3 juta tunawisma di Indonesia, dengan 28.000 berada di Jakarta. Sebanyak 77.500 gelandangan dan pengemis tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia tahun 2019. Pada realitanya masih banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi tunawisma atau tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Banyak juga terlihat tunawisma anak-anak berkeliaran di jalan-jalan, yang seharusnya mereka lagi duduk manis di sekolah dan bisa bermain dengan teman sebaya di taman.⁶

Konstitusi di negara Indonesia telah menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya termasuk pengemis. Hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), pasal 34 ayat (1) dan pasal 34 ayat (2), kemudian hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah

⁴ Syamsi, Ibnu dan Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial Sebuah Kajian Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm7.

⁵ Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Insan Akademika, 2012), hlm. 1

⁶ Achmad Irfan, 2022, Tunawisma is Part of Life, 5 Alasan Tunawisma Harus Punya Tempat Tinggal yang Layak, <https://www.kompasiana.com/achmadirfan5199/6344f82f08a8b57b031ae912/tunawisma-is-part-of-life-5-alasan-tunawisma-harus-punya-tempat-tinggal-yang-layak>, diakses 09 Maret 2023

daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁷

Ada sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis di Indonesia, tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia pada tahun 2021. Biasanya angka ini akan bertambah pada saat-saat tertentu seperti Ramadhan atau awal pandemi COVID-19.⁸ Faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yaitu lajunya pertumbuhan penduduk di perdesaan, kondisi daerah perdesaan, kondisi lapangan kerja, warisan hidup menggelandang, dan faktor alam atau musibah/ bencana.⁹

Tabel. 1 Data PMKS di Dinas Sosial Kota Jambi 2019-2022

No	Tahun	Jenis Pmks				Jumlah
		Gelandangan	Pengemis	Anak Jalanan	Lanjut Usia Terlantar	
1	2020	-	27orang	107 orang	791 orang	925 orang
2	2021	116 orang	221 orang	74 orang	791 orang	1.202 orang
3	2022	223 orang	29 orang	16 orang	1.699 orang	1.967 orang
Jumlah		339 orang	277 orang	197 orang	3.281 orang	

Sumber: Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi, 2019-2023

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2021 sampai 2022 jumlah gelandangan di Kota Jambi adalah 339 orang, dimana jumlah ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah gelandangan di Kota Jambi adalah 116 orang

⁷ Undang-Undang No.11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

⁸ Alifia Nur Faiza/Litbang MPI dengan judul "Negara-negara dengan Jumlah Gelandangan Terbanyak di Dunia, Nomor 5 Tak Disangka.
<https://international.sindonews.com/read/689463/40/negara-negara-dengan-jumlah-gelandangan-terbanyak-di-dunia-nomor-5-tak-disangka-1645138937?showpage=all>

⁹ Ani Mardiyati, Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Kementerian Sosial RI, 2015.

dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 223 orang. Jumlah pengemis di Kota Jambi selama tahun 2020 sampai 2022 adalah 277 orang, dimana jumlah ini mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah pengemis di Kota Jambi adalah 221 orang dan menurun pada tahun 2022 menjadi 29 orang. Jumlah Anak Jalanan di Kota Jambi selama tahun 2020-2022 adalah 197 orang, dimana jumlah ini mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah Anak jalanan di Kota Jambi adalah 74 orang dan menurun pada tahun 2022 menjadi 16 orang. Dan jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi selama tahun 2020-2022 adalah 3.281 orang, dimana jumlah ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah lansia terlantar di Kota Jambi adalah 791 orang dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.699 orang.

Gelandangan yang menjadikan gerobak sebagai tempat tinggalnya kerap terlihat di beberapa sudut Kota Jambi. Mereka yang biasa disebut Manusia gerobak ini kerap mencari barang rongsokan untuk di jual kembali dan dijadikan mata pencaharian. Satu diantara manusia gerobak dari Batanghari dan tidak mau menyebutkan namanya mengatakan dia sudah tidak ada saudara lagi di Batanghari. Bahkan dia sudah tidak ada rumah lagi di Kabupaten yang jaraknya tidak jauh dari Kota Jambi ini. Dalam kesehariannya, pria yang masih terlihat bugar ini biasa memarkirkan gerobaknya di pinggir jalan di Kota Jambi, khususnya di daerah broni dan Telanai.¹⁰

Pada wilayah perkotaan apalagi dalam ibukota Provinsi seperti salah satu ibu kota provinsi yang berada di Indonesia yaitu wilayah Kota Jambi yang merupakan

¹⁰ <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/09/cerita-gelandangan-yang-terjaring-razia-dinsos-mencari-barang-bekas-untuk-makan-di-kota-jambi>

pusat kota Provinsi Jambi, cukup mudah kita ketemukan fakir miskin dan anak-anak jalanan. Padahal, anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa yang dimana kemajuan sebuah bangsa juga ditentukan oleh generasi mudanya. Kota Jambi yang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan jumlah penduduk 619.600 jiwa pada tahun 2022 juga memiliki masalah pengemis, bahkan sudah sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan.¹¹

Pengemis yang semakin banyak di Kota Jambi sangat meresahkan masyarakat, aktivitas pengemis di jalanan sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan. Karena, pengemis bukan hanya berkeliaran di perempatan jalanan tetapi juga melakukan aksinya dengan berbagai cara seperti mengamen, membersihkan kaca mobil yang berhenti di lampu merah, dan meminta-minta.¹² Pengemis anak-anak kini banyak berkeliaran di Pasar Angso Duo Kota Jambi. Masyarakat yang berbelanja disana menjadi resah, karena anak-anak itu silih berganti berdatangan. Pasar Angso Duo merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Jambi dan terletak di pinggiran sungai Batanghari.

Pantauan *Mediajambi News* di Pasar Angso Duo, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun menyebar di dalam area pasar. Mereka satu persatu mendekati pembeli, dengan mencolek dan meminta uang. Pengemis anak itu langsung pergi jika dikatakan tidak, namun tak lama akan datang temannya. Selama 15 menit berada di pasar tersebut

¹¹ Badan Pusat Statistik, Provinsi Jambi dalam Angka, 2022

¹² Fitriani Ulinda, Pengemis Anak-anak Berkeliaran di Pasar Angso Duo Jambi. [https://www-mediajambinews-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.mediajambinews.com/ekonomi-dan-bisnis/amp/pr-6615071720/pengemis-anak-anak-berkeliaran-di-pasar-angso-duo-jambi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1678252329296&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16782522133382&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.mediajambinews.com%2Fekonomi-dan-bisnis%2Fpr-6615071720%2Fpengemis-anak-anak-berkeliaran-di-pasar-angso-duo-jambi](https://www.mediajambinews-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.mediajambinews.com/ekonomi-dan-bisnis/amp/pr-6615071720/pengemis-anak-anak-berkeliaran-di-pasar-angso-duo-jambi?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1678252329296&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16782522133382&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.mediajambinews.com%2Fekonomi-dan-bisnis%2Fpr-6615071720%2Fpengemis-anak-anak-berkeliaran-di-pasar-angso-duo-jambi), diakses 17 Maret 2023.

tidak kurang 6 orang anak datang dan meminta uang. Seorang ibu pedagang sayur mengingatkan untuk tidak memberikan uang, karena hal itu akan mengundang pengemis lainnya untuk berdatangan. Bagi pedagang kehadiran para pengemis cilik itu sangat mengganggu karena membuat pembeli tidak nyaman. Para pedagang mengaku tidak bisa berbuat apa apa dan memilih mendiamkan saja.¹³

Mengemis merupakan upaya mereka untuk bertahan hidup, akan tetapi tentu saja cara mereka tidak bisa dibenarkan, karena cara mereka hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan tindakan preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial oleh pemerintah untuk menangani permasalahan pengemis.¹⁴

Peran pemerintah Kota dalam menangani masalah gelandangan, pengemis, pemulung, dan anak jalanan yang sangat penting, dan upaya untuk menanganinya adalah Pemerintah Kota Jambi sendiri khususnya Dinas Sosial. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan. Peran sebagai suatu kebijakan, peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil. Berangkat dari pernyataan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Jambi berperan melakukan usaha penanganan

¹³ Fitriani Ulinda, Pengemis Anak, diakses 17 Maret 2023.

¹⁴ Ayu Lestari, R. Y. (2021). Peran PantiSosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Banten dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,36.

Gelandangan dan pengemis melalui usaha preventif, represif dan rehabilitif.¹⁵ Peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis yaitu dengan pemberdayaan melalui rumah singgah sebagai sarana untuk mendapatkan keterampilan yang baru serta meninggalkan kehidupannya sehari – hari menjadi pengemis, panti sosial, dan rehabilitasi,¹⁶ serta sosialisasi tentang larangan memberi uang kepada pengemis sesuai surat edaran dari Wali Kota Jambi yang merupakan kebijakan dari Dinas Sosial dalam mencapai tujuan menangani PMKS.¹⁷

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang karena suatu gangguan, hambatan, atau kesulitan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, serta sosial secara akseptabel. Pendataan PMKS seperti Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun. Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Metode yang digunakan dalam pendataan berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

¹⁵ Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan, Bab V.

¹⁶ Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi, 2019-2023

¹⁷ Surat Edaran Nomor 1/EDR/HKU/2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya di Kota Jambi.

pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga.¹⁸

Selama kurun waktu 2019 - 2023, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Jambi yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja, inti permasalahan di Bidang Sosial yang sedang dan masih akan dihadapi seperti ketelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab, dan ketunaan yaitu tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang, seperti gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan OPD Dinas Sosial Jambi yaitu keterbatasan APBD Kota Jambi belum optimal, terbatasnya sarana dan prasarana kesejahteraan social sehingga pelayanan pada masyarakat kurang optimal (Panti, Rumah Singgah, dsbnya), tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum akurat, kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.¹⁹

Beberapa kajian dari penelitian sebelumnya yang pernah diangkat yaitu penelitian Fadhillah (2020) yang berjudul peran Dinas Sosial Kota Jambi dalam

¹⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

¹⁹ Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi, 2019-2023

mengatasi gelandangan menurut Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi, Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui peran Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi. Ingin mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi langsung di lapangan dan pihak Dinas sosial, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Sosial. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa Dinas Sosial Kota Jambi berperan partisipatif dalam penanganan gelandangan yang ada di Kota Jambi. Dengan melakukan penertiban menggunakan usaha preventif dilakukan pemantauan pengendalian, usaha Represif dengan melakukan razia secara rutin dan usaha Rehabilitasi dengan memberikan pembinaan dan pelatihan serta keterampilan kepada gelandangan. Adanya kendala yang dihadapi Dinas sosial dalam penangkapan gelandangan maka dilakukannya upaya untuk mengatasi gelandangan dengan melakukan penertiban berupa razia dan pembinaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian berfokus pada gelandangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada lanjut usia terlantar, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.

Kemudian penelitian Bobby (2021) yang berjudul Peranan Dinas sosial Kota Jambi dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Jambi dibuat dengan latar belakang realitas permasalahan kesenjangan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan upaya dinas sosial kota jambi

dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan berfokus pada salah satu programnya yaitu usaha refresif. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peranan yang dilakukan oleh dinas sosial kota jambi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan studi perbandingan, refrensi, dan khazana suatu gambaran dan juga mengetahui berhasil atau tidaknya peran atau program yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota jambi. Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori Kesejahteraan sosial, dan Peranan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada gelandangan, dan teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan sosial dan peranan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada lanjut usia terlantar, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan, serta teori yang digunakan adalah teori kinerja.

Terakhir penelitian Urbaningrum (2022) yang berjudul Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: Peran pemkot dalam penanganan gepeng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. dinsos berperan dalam upaya rehabilitasi sosial. Pasal 5 Perda Kota Palu tahun 2018 dimana upaya atau tindakan penanganan gelandangan dan pengemis

dilakukan dengan empat cara yaitu upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial. Faktor yang pendukung upaya Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan penanganan gepeng yaitu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM) dan dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat yaitu meliputi mengenai budaya malas gelandangan dan pengemis dan adanya budaya *cash on money*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus pada gelandangan dan pengemis saja, dan juga lokasi penelitian yang berbeda yaitu Kota Palu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada lanjut usia terlantar, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan, serta lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kota Jambi.

Berdasarkan laporan kinerja (LAKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022, dari penyelenggaraan program kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan solusi pemecahan yang terjadi antara lain meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu pengemis, belum optimalnya penanganan dan penertiban razia gepeng (gelandangan dan pengemis), dan meningkatnya belum optimalnya penanganan dan penertiban razia gepeng (gelandangan dan pengemis).²⁰ Banyak faktor yang menghambat Pemerintah mengatasi PMKS di Kota Jambi seperti kurangnya sumber daya manusia dalam penanganan anak jalanan, keinginan anak jalanan yang selalu berubah-ubah menyebabkan program yang dicanangkan untuk mereka tidak maksimal, dan

²⁰ Laporan kinerja (LAKIP) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2022

kesadaran masyarakat dinilai rendah dalam menghadapi dan menyikapi keberadaan anak jalanan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis ingin membuat penelitian ini dengan judul **“Kinerja Dinas Sosial Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala Dinas Sosial Kota Jambi dalam penanganan PMKS bagi Lanjut Usia Terlantar, Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi PMKS bagi gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis, diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi dunia pendidikan tentang bagaimana kinerja Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan di Kota Jambi.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi kepada seluruh masyarakat, kalangan akademisi dan praktisi Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan.

1.5 Landasan Teori

Teori merupakan alat yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang nantinya ditemukan di lapangan. Teori yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan topik yang akan diteliti, berikut teori yang peneliti gunakan:

Menurut Farida Frihatini kinerja atau prestasi kerja adalah sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Kompleksitas dari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, dan berupaya untuk menyediakan kerangka kerja yang holistik dan terukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan.²¹

Penilaian kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan spesifik atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, dalam definisi

²¹ Farida Frihatini, S.E., M.M., Kecerdasan Emosional di Lingkungan Kerja. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

tersebut Bernardin dan Russel menekankan pengertian kinerja sebagai hasil dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada suatu organisasi.²²

Penelitian ini berfokus pada Kinerja Dinas Sosial dalam mengatasi PMKS meliputi Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi. Dengan menggunakan teori dari Bernadin dan Russel, yaitu:²³

a. Kualitas

Kualitas yaitu tingkat dimana proses atau hasil dari kegiatan yang sempurna dengan kata lain melaksanakan kegiatan dengan cara yang ideal atau sesuai dan menyelesaikan sesuatu dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kualitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Jambi yang tinggi, lembaga dapat lebih efektif dalam memenuhi misi mereka untuk mendukung dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

b. Kuantitas

Kuantitas yaitu jumlah siklus kegiatan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi. Indikator kuantitas ini membantu Dinas Sosial untuk mengukur seberapa besar dampak dan jangkauan dari layanan yang mereka berikan, serta untuk mengidentifikasi area-area di mana peningkatan atau perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

²² Ibid

²³ Ibid

c. Efektivitas

Efektivitas yaitu tingkatan dimana penggunaan sumber daya organisasi berupa pegawai, teknologi, dan kerja sama antar pihak lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi PMKS meliputi Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Lanjut Usia Terlantar di Kota Jambi

d. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu tingkat dimana kegiatan diselesaikan atau hasil yang diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan ketepatan waktu adalah salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Jambi efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.²⁴ Sedangkan Kinerja Menurut Torang adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.²⁵

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan

²⁴ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2005 Hal. 174.

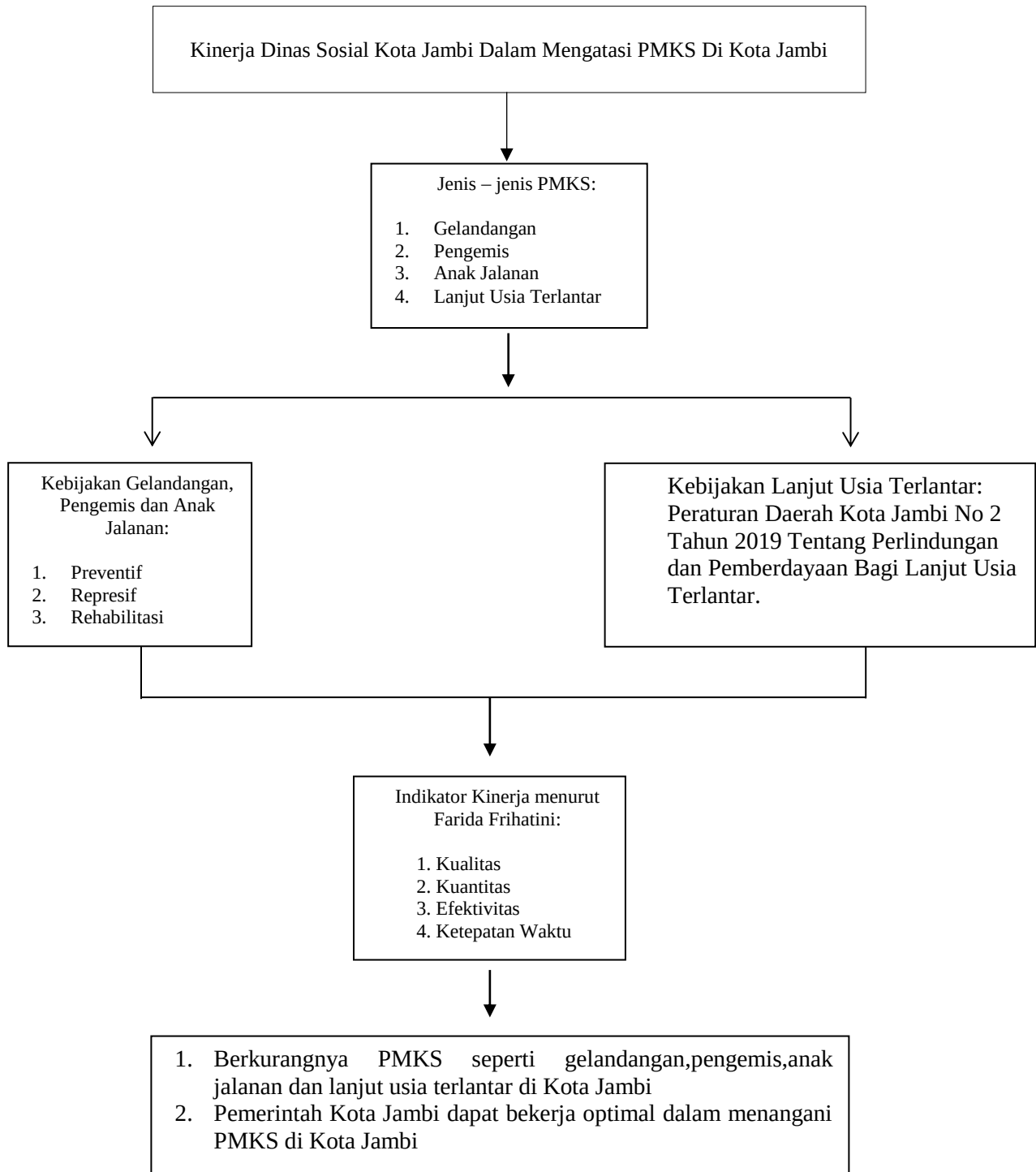
²⁵ Dr. Kamilaus konstanse Oki, SE., ME. , *Otonomi dan kinerja pemerintah daerah*, PT. Pusat Literasi Dunia (Jawa Barat, 2014). Hal.74.

bagaimana cara mengerjakannya. Sedangkan pengertian yang lain, kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering disalahtafsirkan sebagai upaya (effort), yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

²⁶ Armstrong, M dan Baron F. Manajemen Kinerja Cetakan Ketujuh, Jakarta: Erlangga 2016.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai tata cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian, yaitu merupakan prosedur bagaimana mendapatkan, merumuskan kebenaran dari objek atau fenomena yang diteliti.²⁷ Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang peran pemerintah dalam kebijakan menangani PMKS.

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono, metode merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami

²⁷ Sofyan Syafri Harahap. *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hal.56.

keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan mengemukakan hipotesis.²⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam mengenai “peran pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi pengemis di Kota Jambi”, yakni kualitatif deskriptif. Selain itu juga untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan observasi, Wawancara secara mendalam kepada sasaran penelitian.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud adalah di kantor Dinas Sosial Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.²⁹ Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah mengenai objek yang akan diteliti. Dengan adanya batas-batas masalah yang jelas maka dapat mengarahkan dan membimbing penelitian agar lebih terarah dan terperinci, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah peran pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi PMKS di Kota Jambi, yaitu gelandangan, pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Jambi. Alasan mengambil fokus penelitian pada anak terlantar adalah karena berdasarkan data pada Dinas Sosial Kota Jambi bahwa selalu terjadi

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm. 129.

²⁹ Ibid, Hal. 55.

peningkatan anak terlantar setiap tahunnya di Kota Jambi, sedangkan alasan memfokuskan penelitian pada pengemis, lanjut usia terlantar, dan anak jalanan karena jenis PMKS ini merupakan PMKS yang masih sering berada di sekitaran warga di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data Primer dan sumber data Sekunder:³⁰

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Adapun data primer ini peneliti dapatkan langsung dari sumber aslinya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau bisa dikatakan juga data berasal dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat baik melalui wawancara mendalam kepada informan atau bisa juga dari pengamatan secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Sumber data sekunder adalah data yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian. Dimana dalam hal ini didapat baik dari buku- buku, artikel, internet atau media massa yang relevan dengan fokus penelitian dan juga hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

³⁰ Ibid, Hal. 104.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas.³³ Teknik pada penelitian ini yaitu penentuan informan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.³⁴ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.³⁵ Kemudian teknik *snowball sampling* digunakan apabila dalam proses penelitian yang dilakukan informan yang telah ditentukan diawal dirasa masih kurang untuk melengkapi informasi dat yang diperlukan. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.³⁶

Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian. Informan baik yang dipilih secara teknik *purposive sampling* maupun *snowball sampling*., adalah orang-orang yang dianggap mengetahui Secara jelas tentang peran pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi pengemis di Kota Jambi. Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini, yakni:

³³ Ibid, Hal. 91.

³⁴ Ibid, Hal. 95.

³⁵ Ibid, Hal. 96.

³⁶ Ibid.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Pak Ahmad Fikri Aiman	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2	Budi Wahyudi, SE	Penyuluh Sosial ahli muda
3	Apun Hayati	Penyuluh Sosial bidang Lanjut Usia Terlantar
3	Ibu Wenny Ira Reverawati	Pengamat Sosial dari Universitas Nurdin Hamzah
4	Pak Bawalhi	Kasat Satpol PP Kota Jambi
5	Masyarakat PMKS (Pengemis, Anak Jalanan, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan)	

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷

a. Observasi

³⁷ Ibid, Hal. 105.

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³⁸ Dalam pengamatan ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu peneliti mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.³⁹

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara kualitatif (*qualitative interview*), penulis dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁰

Sederhananya wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau dengan kata lain melakukan pengumpulan data bertatap muka dengan responden. Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrument sebagai pedoman wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat seperti *tape*

³⁸ Ibid, Hal. 106.

³⁹ Ibid, Hal. 108.

⁴⁰ Ibid, Hal. 114.

recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁴¹

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴²

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data yang akan dilakukan menggunakan model analisis data Miles & Hubberman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif⁴³ yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara

⁴¹ Ibid, Hal. 115.

⁴² Ibid, Hal. 124.

⁴³ Ibid, Hal. 132.

mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁴⁴

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan ke dalaman wawasan yang tinggi.⁴⁵

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dalam tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola

⁴⁴ Ibid, Hal. 134.

⁴⁵ Ibid, Hal. 137.

hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁶

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁷

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, Hal. 141-142.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama sama.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, Hal. 125.